

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGGARAN PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2021

DITERIMA

Agustus 2023

DIREVISI

September 2023

DISETUJUI

Oktober 2023

**INDEKSASI**

Google Scholar

PENULIS**KORESPONDENSI**Pramanda Rafi
MuhammadEmail:
pram.rafi@student.ub.ac
.idFakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas
Brawijaya, Indonesia

Pramanda Rafi Muhammad*, Atu Bagus Wiguna
Fakultas Ekonomi Pembangunan, Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstract: *The role of the government is indispensable in implementing education development through government spending. Government spending can be reflected as a description of the plan chosen by the government in an area. The Indonesian government annually allocates an education budget from the APBN and APBD of at least 20% to create a quality education system. The World Bank still finds inequality in the unequal distribution of allocations per student. Another condition is the transfer of physical DAK that does not match the required infrastructure. Similarly, it was also found that there are variations in education spending and performance between regions, inefficient spending, the contribution of education spending from PAD that is decreasing, and the need for synergy between spending. This research aims to determine the influence of several factors on the education budget in Indonesia in 2015-2021. This research is a quantitative research with its data analysis method, namely panel data regression analysis. The results showed that teacher qualifications do not affect the education budget. Meanwhile, the Human Development Index and the Number of Students can affect the education budget.*

Keywords: *education budgeting; fiscal federalism; human development index; number of student; teacher qualification*

Abstrak: Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengimplementasikan pembangunan pendidikan ialah lewat belanja pemerintah. Belanja pemerintah bisa dicerminkan sebagai gambaran rencana yang dipilih pemerintah dalam suatu wilayah. Pemerintah Indonesia tiap tahunnya mengalokasikan anggaran pendidikan dari APBN dan APBD sekurang-kurangnya 20% guna menciptakan sebuah sistem pendidikan yang berkualitas. World Bank masih menemukan adanya ketimpangan distribusi alokasi per siswa yang tidak merata. Kondisi lainnya adalah transfer DAK fisik yang tidak sesuai dengan infrastruktur yang dibutuhkan. Hal yang sama juga ditemukan bahwa terdapat variasi belanja dan kinerja pendidikan antar daerah, belanja yang belum efisien, kontribusi belanja pendidikan dari PAD yang makin menurun, serta masih perlunya sinergi antara belanja pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa faktor terhadap anggaran pendidikan di Indonesia tahun 2015-2021. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis datanya, yaitu analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan Kualifikasi Guru tidak mempengaruhi anggaran pendidikan.

Kata Kunci: anggaran pendidikan; federalisasi fiskal; indeks pembangunan manusia; jumlah siswa; kualifikasi guru

Cite this as:

Muhammad, P. R. & Wiguna, A. B. 2023. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anggaran Pendidikan di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*. Volume 02, Number 4, Pages 920-927. Universitas Brawijaya. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.17>

PENDAHULUAN

Dalam Pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa. Banyak negara melakukan investasi besar-besaran dalam sistem pendidikan sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap berkontribusi ke dalam pasar tenaga kerja (Figlio et al., 2018). Pembangunan pendidikan pada dasarnya merupakan tanggungjawab pemerintah, peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengimplementasikan pembangunan pendidikan ialah lewat belanja pemerintah. Belanja pemerintah bisa dicerminkan sebagai gambaran rencana yang dipilih pemerintah dalam suatu wilayah. Dalam upaya mewujudkan pembangunan bidang pendidikan, undang-undang dasar telah mengamanatkan pada pasal 31 ayat (4) yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Alokasi anggaran pendidikan dan persentase alokasi anggaran pendidikan dari total belanja negara dan belanja daerah tiap tahunnya meningkat. Semenjak tahun 2009, Anggaran pendidikan di Indonesia sendiri merupakan sebuah Mandatory Spending, yaitu pengeluaran negara sudah ditentukan oleh undang-undang. Pada UU Nomor 20 Tahun 2003 berhubungan dengan penyediaan anggaran pendidikan menuturkan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya pendapatan pendidik dan belanja pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bidang pendidikan dan minimum 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terdapat beberapa provinsi yang sudah mengalokasikan APBDnya minimal 20% untuk bidang pendidikan. Meskipun masih ada beberapa provinsi yang masih dibawah angka 20%, tetapi dengan adanya transfer daerah jika ditotal alokasi anggaran untuk pendidikan tiap provinsi rata-rata diangka 20%. Alokasi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan belanja publik bidang pendidikan terbesar di Asia. Jika dilihat dari persentase GDP, belanja pendidikan indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Vietnam,

Malaysia, bahkan Timor Leste. Struktur anggaran pendidikan dalam APBN sendiri terbagi menjadi tiga bagian, yaitu; Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, melalui transfer daerah dan melalui pengeluaran pembiayaan. Tingkat dan mutu pendidikan merujuk pada ciri kemajuan seluruh penduduk termasuk penduduk Indonesia. Pendidikan juga merupakan aspek yang berarti pada pemodal sumber daya manusia. Sebab itu, pemerintah mencoba menciptakan pembaharuan yang terlampaui merata lewat desentralisasi pemerintahan sembari diiringi kolaborasi yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah (Vickerman, 2015).

Secara umum, anggaran pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis belanja. Tiga jenis belanja tersebut yaitu: Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta Pembiayaan Anggaran. Porsi anggaran pendidikan terbesar dialokasikan melalui TKDD. Kemudian, berturut-turut melalui BPP dan Pembiayaan Anggaran. Secara nominal, anggaran pendidikan dalam APBN terus meningkat. Pertumbuhan ini karena adaptasi anggaran pendidikan terutama tahun 2020 sebab dilaksanakannya peningkatan pengeluaran negara akibat penanggulangan imbas pandemi Covid-19. Untuk mempertahankan persentase pengeluaran pendidikan sebanyak 20 persen dari pengeluaran negara penting dilaksanakan penyesuaian atas kuantitas anggaran pendidikan.

Anggaran pendidikan via dana Pemerintah Pusat digunakan sebagai implementasi program KIP, BOS dan KIP Kuliah untuk tamatan SMA/ sederajat yang mempunyai kemampuan pendidikan tetapi menyandang masalah keuangan. Pemerintah juga merealisasikan penguatan vokasi melalui peningkatan *link and match* dengan perusahaan, peremajaan 895 gedung SMK, penyegaran 52 kurikulum Vokasi dan Profesi, seraya merenovasi 8 bangunan Politeknik. Besarnya kuota dana pendidikan melalui TKDD disebabkan program pengembangan pendidikan dasar dan menengah sebagai tanggung jawab pemerintah daerah. Anggaran pendidikan melalui TKDD terbentuk berkat sejumlah materi penyusun, yaitu Dana Transfer Umum (yang terbentuk oleh DAU dan DBH) diproyeksikan untuk segmen pendidikan, Dana Transfer Khusus (DTK), Dana Insentif Daerah (DID) bidang

pendidikan dan Dana Otsus yang diproyeksikan sebagai komponen pendidikan bak diamanahkan oleh perundang-undang terkait otonomi khusus.

Selain itu dana pendidikan yang bersumber dari TKDD dimanfaatkan untuk mengakomodasi skema merdeka belajar yang dititikberatkan pada pengembangan kapabilitas SDM. Melalui pergantian prosedur penamaan dan penerapan aktivitas DAK Fisik rehabilitasi sekolah, dimana implementasi pekerjaan sudah tidak diselenggarakan sebagai pengelolaan yang dilakukan oleh sekolah, sebaliknya seperti perjanjian kontrak seraya menyertakan Dinas PUPR Kab/Kota, sedari penganjuran sampai penerapan pekerjaan. Hal ini bertujuan supaya tenaga pendidik bisa terpusat ke beban dan kewajiban utama dalam mengajar, seraya menetapkan mutu teknis konstruksi sesuai dengan standar keselamatan konstruksi. Penyempurnaan program dana BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, maupun pemberian tunjangan bagi guru melalui dana TPG PNSD, Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD. Revisi program ini diselenggarakan demi meyakinkan implementasi anggaran pendidikan dilaksanakan dengan lebih efisien serta berdaya guna untuk aktivitas pendidikan. Anggaran pendidikan pun disalurkan lewat pembiayaan pemerintah pada pos anggaran pengelolaan.

Hasil riset di 38 negara (Maozhong & Shen, 2011) membuktikan bahwa terdapat 11,46% dari investasi pemerintah dalam bidang pendidikan berpengaruh terhadap penurunan derajat ketimpangan pendidikan. Walaupun sudah diatur dalam undang-undangan tentang *mandatory spending*, sebagian wilayah di Indonesia pun tampak disparitas pada unsur pendidikan spesifiknya di wilayah terbelakang yang tidak memperoleh kesempatan prasarana pokok (Saputra et al., 2015). World Bank masih menemukan adanya ketimpangan distribusi alokasi per siswa yang tidak merata. Sebagai contoh pada Gambar 1.4, provinsi Jawa Barat menerima alokasi pendidikan sebesar 8,1 Triliun atau Rp. 890.000 per siswa sedangkan Provinsi Papua Barat menerima alokasi pendidikan sebesar 3,6 Triliun atau Rp. 15 Juta per siswa.

Kondisi lainnya adalah transfer DAK fisik yang tidak sesuai dengan infrastruktur yang dibutuhkan. Hal yang sama juga ditemukan oleh PROSPERA bahwa terdapat variasi belanja dan kinerja pendidikan antar daerah, belanja yang belum efisien, kontribusi belanja pendidikan dari PAD yang makin menurun, serta masih perlunya sinergi antara belanja pemerintah pusat dan daerah. Todaro dan Smith mengutarakan jika ketimpangan tidak saja bersumber pada aliran pemasukan tetapi dari pendidikan juga. Sebab pendidikan mewujudkan capaian pembentukan yang fundamental (Tambuna, 2013). Walaupun belakangan ini terjadi peningkatan dalam belanja pendidikan secara keseluruhan, investasi Indonesia untuk pendidikan menengah, terutama menengah pertama, masih kurang. Pada saat yang sama, anggaran operasional telah ditekan karena peningkatan substansial dalam pengeluaran untuk gaji. Temuan tersebut merupakan sedikit dari banyaknya persoalan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu anggaran pendidikan perlu dipetakan dengan baik dengan tujuan untuk mengetahui di mana pemerintah dapat menjalankan kebijakannya dan lebih berdampak pada *output* yang dihasilkan dari alokasi anggaran pemerintah.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pengeluaran Pemerintah

Adolf Wagner (dalam Wilantari, 2012) mencetuskan konsep belanja pemerintah ada-pun populer sebagai istilah "*law of ever increasing activity*" lalu dites ulang oleh Peacock dan Wiseman. Konsep tersebut menunjukkan maka beban pemerintah serta aktivitas pemerintah beranjak bertambah. Tren ini oleh Wagner menuturkan sebagai hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Teori Rostow dan Musgrave (dalam Mubaraq et al., 2013) memperkenalkan model pembangunan tentang pertumbuhan belanja pemerintah. Konsep ini menghimpun pertumbuhan belanja pemerintah dengan fase-fase pembangunan ekonomi yang dibedakan antara fase dasar, fase medium dan fase maju. Pada fase dasar terbentuknya pertumbuhan ekonomi, persentase investasi pemerintah berlandaskan total investasi besar sebab pemerintah wajib mempersiapkan sarana serta prasarana semacam pendidikan, kesehatan dan transportasi

Teori Fiscal Federalism

Federalisme fiskal merupakan pengamatan kaitan antara keuangan dengan tingkatan pemerintah dimana sistem ini menggunakan program pemerintah yang meletakkan pada tingkat pemerintah yang berbeda. Berawal dari sebuah prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk semua negara yang berusaha mengaplikasikan desentralisasi fiskal. Pada versi federalisme fiskal, sentralisasi keuangan di pusat begitu tinggi. Rancangan yang sepadan untuk desentralisasi berupa top down dan ber-sistem dekosentrasi (pengalihan otoritas pemerintah pusat kepada daerah tingkat II), pemerintah pusat secara sepihak dapat menetapkan dan mengganti baik tanggung jawab belanja maupun perolehan Pemerintah Daerah dan penataan hubungan keuangan antara pemerintahan sebagai upaya mengatasi permasalahan. Rekomendasi dari sangkutan fiskal dari teori federalisme fiskal ini adalah beraneka wujud transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Dati I ke Dati II) dalam konsep untuk membangkitkan ekonomi dan infrastruktur daerah. Umumnya akan dibelanjakan Pemerintah Daerah sesuai dengan petunjuk dan sektor-sektor yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sangkutan fiskal dengan model federalisme ini relevan pada berbagai bentuk transfer dari Pusat kepada Daerah. Dalam praktik desentralisasi fiskal, setiap daerah juga didesak untuk membiayai sendiri biaya pembangunannya, kenyataannya pendapatan daerah tidak bisa membiayai seluruh pengeluarannya. Sebab itu, transfer dana dari pusat (*intergovernmental transfer*) menjadi asal penerimaan yang sangat dominan bagi pemerintah daerah. Transfer pusat ke daerah dikhususkan atas bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan sumbangan (*grants*). Pemindahan tersebut penting untuk merangsang otonomi regional dan untuk memperbaiki infrastruktur lokal. Pada umumnya transfer akan dibelanjakan sesuai pedoman yang telah ditentukan Pemerintah pusat.

Perencanaan Pendidikan

Perencanaan Pendidikan merupakan suatu metode yang menyajikan seperangkat

alternatif ketetapan untuk aktifitas mendatang yang difokuskan demi penerimaan sasaran serta tindakan yang maksimal serta meninjau kondisi yang terdapat di sektor ekonomi, sosial budaya yang merata di sebuah Negara (Yusuf Enoch dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Selain itu Perencanaan pendidikan merupakan satu cara berpikiran mendalam, mendeskripsikan, menafsirkan, serta menakar dan menentukan hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk menggapai target yang sudah dipilih atau dapat disebutkan bahwa perencanaan pendidikan merupakan aktivitas yang hendak diselenggarakan kelak menggapai maksud dalam segmen pendidikan (Sanjaya, 2015).

Teori Pembiayaan Pendidikan

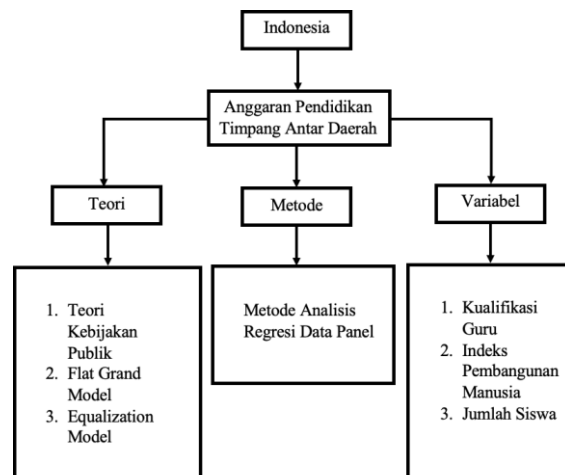
Berdasarkan sebuah jurnal (Armida, 2011) mengemukakan bahwa jenis pembiayaan pendidikan mempunyai dua aspek yaitu aspek pengalokasian dan aspek pemasukan. Sebagaimana yang diutarakan oleh John S. Mrophet, berdasarkan hakikatnya pembiayaan dikategorikan jadi dua jenis, yakni: Flat Grand Model memakai sistem penyebaran dana, seluruh Kabupaten/kota memperoleh perhitungan dana proporsional tiap pelajar tanpa menampilkan perbandingan kesanggupan wilayah. Wilayah yang berlimpah sumber dayanya dan wilayah kurang menunjang (miskin) sumber daya alamnya, demi menanggung skema pendidikan tiap memperoleh dana dengan nilai yang seimbang serta menakar biaya per pelajar selama 1 (satu) tahun yang diperhitungkan semacam relevansi yang beraneka macam pada anggaran yang didistribusikan kepada sekolah. *Equalization Model* ini bertumpu mengikuti *ability to pay* (kesanggupan membayar) penduduk. Penduduk tidak mampu hendaklah mendapatkan dorongan dana lebih intens dibandingkan dengan penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebab itu sekolah miskin berpeluang sejajar dengan sekolah lainnya, maksudnya per wilayah menerima total anggaran yang bervariasi setiap tahun bergantung kepada kesanggupan daerah.

Teori Ekonomi Pendidikan

Biaya pendidikan menurut Samuelson (dalam Ferdi, 2013) erat kaitannya dengan teori ataupun konsep ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan pada hakikatnya menggambarkan “wujud aktivitas tentang bagaimana manusia memutuskan, pakai atau tak pakai uang, demi menggunakan sumber daya berlimpah nan jarang untuk menghasilkan bermacam tipe penyuluhan, perluasan pengetahuan, keahlian, penguasaan diri, sifat, dan lain-lain, terpenting menyongsong pendidikan resmi pada kurun waktu tertentu serta mengedarkannya, saat ini dan kelak, di golongan masyarakat”. Ekonomi pendidikan berhubungan dengan, proses implementasi pendidikan, pembagian pendidikan di golongan individu dan kelompok yang memprioritaskan, bayaran yang disediakan rakyat atau pribadi untuk urusan pendidikan serta tipe aktivitas segalanya yang diinginkan. Asal mula aspek teori ekonomi pendidikan, spesifiknya menelaah skema human capital yang dikemukakan oleh Cohn (dalam Ferdi, 2013) dalam model Pendekatan human capital yang disempurnakan dalam wujud varian tersebut. Perspektif pembiayaan diamati sebagai sudut pandang pendanaan pendidikan yang memastikan tahap kapasitas pribadi maupun golongan. menurut waktunya tingkat inventivitas ini mempengaruhi tingkat perolehan (*earning*) individu atau golongan, yang kesimpulannya bersumbangsih tentang kelajuan perkembangan ekonomi dan pembangunan.

Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan Pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan, Anggaran pendidikan di Indonesia tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Meningkatnya anggaran pendidikan setiap tahunnya tentu saja karena beberapa hal seperti peningkatan kualitas guru, jumlah guru atau tenaga pendidik, jumlah siswa dan jumlah sekolah (Supardi, 2015).



Sumber: Penulis, 2022

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Pengembangan Hipotesis

H1: Diduga Kualifikasi Guru memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pendidikan di Indonesia.

H2: Diduga Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pendidikan di Indonesia.

H3: Diduga Jumlah Siswa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pendidikan di Indonesia.

METODE

Dengan menggunakan metode regresi data panel untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi anggaran pendidikan di Indonesia dan menggunakan empat variabel bebas yaitu, jumlah guru, kualitas guru, jumlah siswa, dan jumlah sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyematkan data sekunder yang diperoleh berasal dari Badan Pusat Statistik dan Kemendikbud. Penelitian ini mengambil data dari 34 provinsi di Indonesia mulai tahun 2015 sampai 2020. Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari variabel independent yaitu: Jumlah Guru, Kualitas Guru, Jumlah Siswa, Jumlah Sekolah dan Variabel dependen adalah Anggaran Pendidikan di Indonesia. Paparan tersebut dijabarkan dengan definisi operasional sebagai berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Ditulis dengan subbab yang dimulai dari karakteristik responden. Karakteristik responden dapat disajikan dalam bentuk paragraf atau berupa tabel. contoh tabel dalam 1 kolom dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

| Xxxxx | Xxxxx | Xxxxx |
|-------|-------|-------|
| Xxxx | 000 | Xx% |
| Xxxx | 000 | Xx% |
| Xxxx | 000 | Xx% |

Sumber: Pengolahan Data Primer (2022)

Hasil Analisis Data

Sub bab ini memuat tentang analisis data hasil penelitian yang diperoleh penulis melalui metode pengumpulan data. Dapat disajikan dalam bentuk tabel kemudian dijelaskan arti angka-angka statistik yang tertera.

Pengujian Hipotesis

Sub bab ini berisi tentang hasil pengujian hipotesis terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Disajikan dalam paragraf secara berurutan satu per satu hipotesis yang diabil.

Hubungan antar Variabel X dan Y

Tabel 2. Hipotesis Penelitian

| Hipotesis | Keterangan | Jalur |
|-----------|----------------------------|--------|
| H1 | Variabel X1 mempengaruhi Y | X1 → Y |
| H2 | Variabel X2 mempengaruhi Y | X2 → Y |

Sumber: Data Penelitian (2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian terkait Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Pendidikan Di Indonesia Tahun 2015-2021, maka ditarik kesimpulan bahwa Kualifikasi Guru tak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Anggaran Pendidikan di Indonesia tahun 2015-2021. Penyebabnya adalah seiring berjalannya kebijakan pemerintah dalam mendukung kualifikasi guru yaitu dengan mendorong guru-guru yang masih memiliki jenjang pendidikan dibawah S1 untuk

Sub bab ini berisi pembahasan bab hasil, dilarang menampilkan angka-angka statistik, pembahasan harus selengkap mungkin, dan disertai dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan hasil yang dibahas. Sub bab ini berisi tentang hubungan antar variabel satu per satu yang disertai dengan penelitian-penelitian sebelumnya baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Penelitian terdahulu baik yang mendukung atau tidak, keduanya harus diberi alasan bagaimana hal itu terjadi. Selain itu, perlu juga menunjukkan perbedaan dari penelitian sebelumnya yang tercantum dengan penelitian ini. Penulisan kutipan perlu menggunakan aplikasi referensi manajer. Sebagai contoh jika kutipan diletakkan pada awal kalimat maka ditulis dengan nama penulis dan diikuti tahun dalam kurung. Contoh menurut Endre (2022) jika kutipan diletakkan pada akhir kalimat maka nama penulis diikuti koma dan tahun ditulis dalam kurung. Contoh penulisan kutipan yang diletakkan diakhir kalimat (Endre, 2022). Jika penulis ada 2 orang maka menggunakan kata hubung “dan”. Jika penulis lebih dari 2 orang maka menggunakan singkatan “dkk”.

Jika tabel tidak cukup dalam 1 kolom maka harus diletakkan di bagian bawah halaman yang membahas tabel tersebut, contoh dapat dilihat pada tabel 2.

melanjutkan studi menjadi S1 terus mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dengan persentase guru yang diatas S1 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hampir mendekati angka 100% sehingga pengeluaran pemerintah untuk peningkatan kualifikasi guru mengalami penurunan dan menyebabkan alokasi anggaran tersebut digunakan untuk yang lainnya dalam proses penciptaan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang secara signifikan terhadap Anggaran pendidikan di

Indonesia. Bagi Indonesia, IPM menggambarkan data krusial karena selain sebagai tolak ukur kinerja pemerintah, IPM pun diaplikasikan sebagai salah satu faktor yang menjadi determinan besarnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk meningkatkan IPM suatu daerah maka diperlukan peningkatan Anggaran Pendidikan yang digunakan pada program-program yang dapat meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah. Jumlah Siswa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap anggaran pendidikan di Indonesia tahun 2015-2021. Pemerintah telah berhasil menjalankan program wajib belajar 9 tahun. Salah satu keberhasilannya ialah Angka Partisipasi Kasar di Indonesia pada tahun 2021 untuk Sekolah Dasar (SD) sebesar 106,20% dan 92,80% untuk Sekolah Menengah Pertama. Dengan meningkatnya angka partisipasi kasar dalam hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program bantuan yang diberikan kepada sekolah guna mendukung pembelajaran dan aktifitas belajar mengajar. Untuk besaran Dana BOS Reguler yang disalurkan konsisten seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat di Dapodik yang dikalikan dengan satuan biaya per masing-masing tingkat pendidikan. Selain biaya satuan yang mengalami peningkatan, tanggungjawab pemerintah selama mendistribusikan Dana BOS direalisasikan mengikuti pertambahan total target dan pembiayaannya.

Saran

kepada Pemangku kebijakan terutama *stakeholder* yang merumuskan anggaran pendidikan di Indonesia seperti pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih memperhatikan pos-pos alokasi anggaran mana yang dirasa sudah cukup baik dari segi kualitas realisasinya maupun outputnya, sehingga jika sudah baik bisa dialokasikan untuk kegiatan atau kebijakan lain yang dirasa kurang atau belum efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti jumlah guru yang sudah terakreditasi yaitu memiliki ijazah D4/S1 terus meningkat tiap tahunnya tentu saja anggaran yang pada mulanya untuk peningkatan jenjang pendidikan guru bisa dialokasikan untuk kebijakan lain yang dirasa belum cukup atau kurang dari sisi kualitasnya. Pemerintah

juga harus memperhatikan sisi dalam penentuan alokasi anggaran per siswa sebab masih terdapat ketimpangan antar daerah tentu saja hal ini dapat mempengaruhi anggaran pendidikan itu sendiri jangan sampai anggaran yang sudah digelontorkan menjadi sia-sia tanpa adanya output dari sumberdaya manusia yang berkualitas. Dengan tercerminnya dari nilai IPM yang rendah menandakan adanya ketidak efisienan antara alokasi anggaran pendidikan dengan kualitas sumberdaya yang dihasilkan. Selain pengalokasian untuk program-program yang efektif dan efisien, hal yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana program-program yang sudah dianggarkan dan direncanakan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten. Anggaran yang cukup, program-program yang efektif dan efisien, dan pelaksanaan yang konsisten adalah modal bagi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

IMPLIKASI

Implikasi penelitian menunjukkan bagaimana temuan mungkin penting dengan penjelasan sebab akibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Y. (2015). *Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur 2006-2013*.
- Armida, A. (2011). *Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Media Akademika.
- Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara, H. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 1(1), 77–102.
- Dunia, B. (2011). *Mentransformasi Tenaga Pendidikan Indonesia, Volume II: Dari Pendidikan Prajabatan hingga ke Masa Purnabakti: Membangun dan Mempertahankan Angkatan Kerja yang Berkualitas Tinggi, Efisien, dan Termotivasi*. Jakarta: Bank Dunia.
- Ekananda, M. (2018). *Analisis Ekonometrika Data Panel Edisi 2: Teori Lengkap dan*

- Pembahasan Menyeluruh Bagi Peneliti Ekonomi, Bisnis, dan Sosial.*
- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578.
- Figlio, D., Holden, K. L., & Ozek, U. (2018). Do students benefit from longer school days? Regression discontinuity evidence from Florida's additional hour of literacy instruction. *Economics of Education Review*, 67, 171–183.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (X)*. Badan Penerbit - Undip.
- Ilhami, S. (2014). *Analisis Pengaruh Anggaran Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*.
- Indahri, Y. (2019). Peran Sekolah dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(1), 49–60.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Modul Diklat Perencanaan Pendidikan. http://eksis.ditpsmk.net/uploads/book/file/BAE7D782-739E-4D3B-9795-42DB20797244/Modul_Diklat_Perencanaan_Pendidikan.pdf
- Kharisma, B. (2013). Dampak program bantuan operasional sekolah (BOS) terhadap tingkat putus sekolah di Indonesia: analisis DID. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.
- Maozhong, L., & Shen, H. (2011). Educational inequality analysis: international comparison. *International Journal of Business and Social Science*, 2(16).
- Mubaraq, R., Remi, S. S., & Muljarijadi, B. (2013). *Pengaruh Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja dan Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Indonesia*. Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran. Bandung.
- Sanjaya, W. (2015). *Perencanaan dan desain sistem pembelajaran*. Kencana.
- Saputra, D., Syechalad, M. N., & Nasir, M. (2015). Analisis Ketimpangan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(2).
- Statistik, B. P. (2015). *Indeks pembangunan manusia 2014 metode baru*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Supardi, U. S. (2015). Arah pendidikan di Indonesia dalam tataran kebijakan dan implementasi. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(2).
- Suprihatiningrum, J. (2013). *Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Tambuna, S. (2013). *Analisis Ketimpangan Pendidikan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Vickerman, R. (2015). High-speed rail and regional development: the case of intermediate stations. *Journal of Transport Geography*, 42, 157–165.
- Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2011). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25–42.
- Wilantari, R. N. (2012). *Analisis kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jember dalam Era Desentralisasi Fiskal*, Vol. 2 (No. 2): 269-280. Diambil Kembali Dari: [Http://www.repository.unej.ac.id/Handle/123456789/203](http://www.repository.unej.ac.id/Handle/123456789/203).
- Winarno, W. W. (2017). *Analisis ekonometrika dan statistika dengan eviews*.